

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-15, Rajawali Press, Jakarta.

B. Tesis / Seminar Ilmiah

- Hadli, "Penggunaan Hak Ingkar Oleh Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana" (Studi Kasus Putusan No. 106/Pid.B/2009/PN/PLR di Palangka Raya), *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Ridho M. Sulaeman, “Penggunaan Hak Diam Dalam Pemeriksaan Atas Akta Yang Dibuat Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Machsun Miftahul, “Kewajiban dan Hak Ingkar Notaris”, Diskusi Panel, Seminar Nasional Kupas Tuntas Hak Ingkar Notaris, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Solo, 14 November 2015.

Seminar Nasional, “Kupas Tuntas Hak Ingkar Notaris”, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia, Solo, 14 November 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344\\.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Notaris

Wawancara

Djoko Sukisno, 2015, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Kewajiban Ingkar Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 18 September 2015.

Nukman Muhammad, 2015, Notaris dan PPAT Kota Yogyakarta, *Pelaksanaan Kewajiban Ingkar dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 27 Oktober 2015.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sumpah>, diakses pada tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20:00 WIB.

Adjie Habib, 2013, *Memahami Hak dan Kewajiban Ingkar*, habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf, diakses pada tanggal 12 Oktober 2015, Pukul 16:04 WIB.